

ANALISIS KONFLIK POLITIK ELITE TNI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

Mulyer Mananda Setyahadi

Universitas Pamulang

email: dosen01111@unpam.ac.id

Paper Accepted: 18 Maret 2018
Paper Reviewed: 20-27 Maret 2018
Paper Edited: 01-15 April 2018
Paper Approved: 22 April 2018

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara Republik Indonesia yang lahir ketika masa perang kemerdekaan. Tentara ini didirikan dengan merekrut para perwira bekas anggota Angkatan Bersenjata Hindia Belanda, yaitu KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*), dan para perwira bekas anggota tentara pada masa pendudukan Jepang, yaitu PETA (Pembela Tanah Air), serta laskar-laskar perjuangan yang dileburkan, sehingga terbentuklah TNI. Dalam perkembangannya, TNI banyak mengalami konflik politik baik di dalam maupun di luar TNI. Peristiwa Madiun 1948 pada masa perang kemerdekaan membuah konflik eksternal TNI terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terus berlanjut hingga masa demokrasi terpimpin. Perbedaan asal usul dari perwira-perwira TNI dari KNIL, PETA dan Laskar-laskar menyebabkan terjadinya konflik-konflik internal pada TNI. Sikap yang berbeda-beda dari para perwira TNI terhadap PKI dan Presiden Soekarno berakibat konflik internal pada diri elite TNI. Pada periode 1959-1966, TNI selalu disibukkan dengan konflik internal dan eksternal sehingga TNI tidak dapat bersatu sikap. Meskipun TNI pada periode itu menjadi kekuatan politik yang sangat signifikan yang tercermin dari kedudukannya di kabinet, tetapi hal itu tidak membuat TNI dapat meraih kekuasaan sepenuhnya pada saat itu.

Kata Kunci : Konflik Elite TNI; Demokrasi Terpimpin

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi tentara yang lahir di tengah-tengah revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi tentara lahir atas desakan keadaan yang mengharuskan mereka memberikan perlawanan secara militer terhadap Belanda yang ingin kembali mencengkeram kekuasaannya di Kepulauan Nusantara. Dan tidak hanya itu, TNI ini juga berfungsi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia di masa setelah perang kemerdekaan.

Para perwira TNI adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman militer di masa-masa sebelum revolusi. Mereka adalah bekas-bekas personel Angkatan Bersenjata Kolonial

Belanda yang dinamakan KNIL (*Koninklijke Nederlandshe Indische Leger*) dan pasukan yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukannya yang dinamakan PETA (Pembela Tanah Air). Lalu perbedaan di antara kedua asal-usul ini menyulut pertentangan di antara mereka baik pada masa perang kemerdekaan maupun sesudahnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tapi keberadaan BKR ini pun belum jelas arahnya, karena berbagai sebab, seperti masih adanya pasukan militer Jepang di lapangan. Belum lagi masalah yang akan dihadapi bila Sekutu telah datang. BKR berada di bawah kendali Komite Nasional Indonesia (KNI) pada setiap daerahnya. Kemudian pemerintah sipil memfungsikan BKR ini lebih pada fungsi polisi, yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban. Tapi kemudian pertempuran-pertempuran yang terjadi versus pasukan Jepang pada akhir September 1945 dan melawan pasukan Sekutu pada awal Oktober, menjadikan tanda yang jelas bahwa Negara yang baru ini harus memiliki organisasi tentara yang memiliki hirarki struktural. Maka pada 5 Oktober 1945, BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Posisi kepemimpinan dalam TKR ini banyak dipegang oleh para perwira bekas KNIL, karena pengalaman militer mereka lebih panjang ketimbang yang dari PETA. Para perwira bekas PETA itu sesungguhnya ketika masa pendudukan Jepang hanya pernah mendapatkan pengalaman memimpin pasukan sampai tingkat batalion atau tidak pernah sampai pada tingkat di atasnya. Kemudian terjadi saling curiga di antara para perwira bekas KNIL terhadap perwira-perwira bekas PETA. Kedua "kubu" ini saling berebut untuk menguasai senjata. Saling curiga antara bekas PETA terhadap bekas KNIL itu kemudian diupayakan penyelesaiannya dengan menyelenggarakan Konferensi Tentara menjelang pertengahan November 1945 di Yogyakarta. Kemudian hasil konferensi ini adalah dipilihnya Soedirman sebagai Panglima Besar Tentara dengan pangkat Jenderal, dan Oerip Soemaharjo sebagai Kepala Staf Tentara dengan pangkat Letnan Jenderal. Para prajurit dapat memilih sendiri komandannya.

Setelah konferensi itu maka TKR segera melaporkan struktur organisasi TKR yang telah dibentuk kepada pemerintah pusat. Hal ini mengejutkan kabinet yang mana di dalamnya Amir Sjarifuddin menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun akhirnya hal ini dapat diterima oleh Pemerintah Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Walaupun sebenarnya Amir Sjarifuddin berpandangan bahwa perwira-perwira tentara yang ada hanyalah semata-mata ciptaan para penguasa terdahulu, yaitu imperialisme Belanda dan fasis Jepang. Inilah kemudian yang membuat Soedirman marah atas fitnah yang menuduhnya fasis. Perpindahan Ibu kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946 dari Jakarta menuju Yogyakarta adalah akibat tidak amannya Jakarta yang telah diduduki pasukan Sekutu.

Tanggal 23 Februari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Maksud perubahan ini adalah untuk melambungkan kerjasama badan-badan perjuangan yang tidak regular yaitu laskar-laskar perjuangan dari partai-partai politik, dengan tentara regular yaitu TRI. Namun perubahan ini tidak berhasil, karena laskar-

laskar itu terus berafiliasi secara ideologis kepada partai-partai politik, bahkan mereka cenderung menantang otoritas TRI. Namun ternyata laskar-laskar itu disalahgunakan oleh partai-partai politik demi kepentingan para politisi itu sendiri. Menghadapi masalah ini, kemudian pada 3 Juni 1947 TRI diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai peleburan semua laskar-laskar perjuangan dengan tentara regular.

Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 membuat hubungan militer dan sipil menjadi buruk. Perjanjian itu menghasilkan penyempitan wilayah Republik di mana wilayahnya tinggal Ibu kota Yogyakarta. Dampaknya adalah Divisi Siliwangi harus hijrah dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Para pemimpin militer mempertanyakan efektivitas dan kehandalan para politisi dalam berdiplomasi. Wilayah yang sudah di pertahankan secara fisik oleh tentara kemudian dipersempit oleh Perjanjian Renville dan Linggarjati.

Selain itu TNI harus menghadapi bekas Laskar Hizbullah yang tadinya berafiliasi pada Partai Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), yang kemudian membentuk Darul Islam (DI) sebagai protes terhadap Perjanjian Renville yang mengharuskan mereka meninggalkan Jawa Barat, namun dengan DI itu mereka tidak mau meninggalkan Jawa Barat, dan akhirnya justru berhadapan dengan TNI.

Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer ke-2. Serangan tertuju pada Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Hatta, dan menteri-menteri lainnya. Jenderal Soedirman serta pasukannya segera bergerilya ke daerah-daerah pedalaman. Kemudian didirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra, di bawah pimpinan Perdana Menteri Sjafrudin Prawiranegara.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Soedirman maka TNI mempertahankan eksistensi Republik Indonesia sekaligus eksistensi TNI dengan perang gerilyanya. Dalam keadaan yang jelas darurat apalagi keberadaan pemerintah sipil telah tidak berfungsi akibat tertawan oleh pihak musuh maka jelaslah di sini kiprah politik tentara yang praktis harus mengambil alih semua fungsi untuk mengatur segala sesuatu kebutuhan bagi terus eksisnya negara Republik Indonesia.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik internal dan konflik eksternal para elite TNI yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin?
2. Bagaimana konflik internal dan konflik eksternal para elite TNI tersebut membuat Presiden Soekarno dapat mengendalikan para pimpinan TNI dan memiliki kontrol yang begitu kuat atas para pimpinan TNI?.

Kerangka Teori

Organisasi militer modern timbul karena munculnya konsep *nation state*, besarnya bahaya perang, dan luasnya ruang lingkup sasaran keamanan nasional. Dalam kerangka negara-bangsa yang modern, Samuel Huntington membagi militer berdasarkan orientasinya menjadi dua, yaitu “militer profesional” dan “militer pretorian”. Namun Amos Perlmutter (1984) walaupun masih dalam kerangka klasifikasi dari Huntington, membagi militer yaitu selain profesional dan pretorian, masih ada satu lagi, yaitu “militer revolusioner”.

Militer profesional adalah militer yang eksis pada sistem politik yang stabil. Jenis militer profesional ini adalah militer yang bersikap pasif terhadap politik negara karena posisinya yang hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara terhadap serangan musuh dari luar negara. Sedangkan militer pretorian tumbuh dalam kondisi politik yang labil. Militer pretorian adalah militer yang bersikap tidak pasif terhadap politik negara karena ketidakefektifan pemerintahan sipil sebagai akibat ketidakstabilan politik. Militer revolusioner ialah alat revolusi yang tunduk di bawah orde politik sipil, tidak melakukan intervensi pada politik. Tentara ini terbentuk sebagai angkatan bersenjata massal, yaitu sebuah bangsa yang dipersenjatai untuk revolusi. Maka bentuk peran politiknya bersifat laten alias tidak langsung terang-terangan, tapi punya potensi untuk menjadi bersikap tidak pasif terhadap politik negara, apabila terjadi gejala-gejala politik tertentu yang dianggap membahayakan revolusi.

Membahas mengenai konflik, maka di sini mengambil kerangka pemikiran konflik dari Maurice Duverger. Menurut Maurice Duverger (2003), konflik politik berarti ketergantungan politik antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam kekuasaan politik. Maurice Duverger

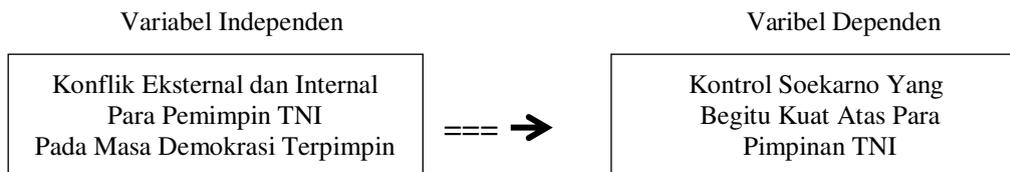
membagi dua jenis pergolakan pada rezim, yaitu yang pertama ialah “pergolakan di dalam rezim”, dan yang kedua ialah “perjuangan merebut rezim”.

Yang dimaksud dengan pergolakan di dalam rezim adalah bila di dalam sebuah rezim ada suatu ketegangan antar pihak-pihak yang saling antagonis (bermusuhan), yang mana pihak-pihak itu merupakan bagian dari rezim. Saling berseberangan namun tidak ada upaya untuk mengubah rezim tersebut atau merebut kekuasaan sepenuhnya atas rezim itu. Pergolakannya bersifat mempertahankan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik dan berusaha meningkatkan peran politik dari masing-masing pihak tersebut tanpa mencoba untuk menguasai rezim itu sepenuhnya. Jadi pihak-pihak itu berusaha memperbesar porsi kekuasaannya sampai batas-batas tertentu. Lain halnya dengan perjuangan merebut rezim. Konflik semacam ini menempatkan pihak-pihak dalam pertentangan untuk saling mendapatkan kekuasaan pada rezim itu sepenuhnya, atau menjadi penguasa baru dalam rezim itu.

Menurut Maurice Duverger, pada dasarnya tujuan utama dari politik adalah untuk menghapus kekerasan, untuk mengganti konflik berdarah dengan bentuk-bentuk perjuangan sipil yang lebih dingin. Dan untuk menghapus peperangan, baik dalam negeri maupun internasional. Politik adalah konflik, tapi itu juga pembatasan konflik, dan konsekuensinya adalah suatu permulaan dari proses integrasi. Namun ini tidak mutlak. Politik cenderung menghapus kekerasan, tapi itu tidak pernah berhasil sepenuhnya. Senjata-senjata dalam arti senjata militer tidak seluruhnya disisihkan dari konflik politik.

Persaingan di dalam kekuasaan, bukan hanya terjadi antar kelompok, tapi juga terjadi antar individu. Begitupun perjuangan untuk merebut kekuasaan, itu bisa terjadi antar kelompok dan antar individu. Persaingan antar individu di dalam satu kekuasaan berarti konflik di antara individu-individu itu untuk mempertahankan atau meningkatkan kepentingannya sampai pada batas-batas tertentu, bukan ingin meraih kekuasaan itu sepenuhnya. Pertentangan antar individu untuk merebut kekuasaan itu berarti perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan itu sepenuhnya.

Kerangka Analisis



Untuk lebih memperjelas analisis di atas, maka berikut ini akan diuraikan konsep-konsep sebagai berikut:

- Variabel independen adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap akibat yang terjadi.
- Variabel dependen adalah dampak yang dipengaruhi oleh penyebab penyebabnya.
- Elite TNI adalah orang-orang yang menduduki jabatan pada pucuk pimpinan TNI, contohnya yaitu para perwira senior yang menjabat seperti Panglima Angkatan Darat yang dijabat oleh Abdul Haris Nasution.
- Demokrasi terpimpin adalah periode kekuasaan yang berlangsung sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Surat Perintah 11 Maret 1966 di mana penguasa demokrasi terpimpin itu adalah Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
- Konflik internal adalah konflik yang terjadi di antara para pimpinan TNI, contohnya, konflik antara pimpinan Angkatan Darat terhadap para pimpinan Angkatan Udara.
- Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara para pimpinan TNI terhadap para pimpinan PKI dan Presiden Soekarno sehingga Presiden Soekarno dapat dengan begitu kuatnya mengendalikan para pimpinan TNI.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang dimaksud memberikan gambaran gejala politik yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data tidak berbentuk angka-angka, tapi keterangan-keterangan atau informasi yang diambil kesimpulannya secara logika. Sudah banyak informasi mengenai gejala politik yang dimaksud, namun informasi itu belum menandai untuk menjelaskan permasalahan yang dimaksud. Penelitian ini untuk menjawab apa penjelasan yang lebih

terperinci mengenai gejala politik yang dimaksudkan dalam permasalahan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan, artinya data diambil dari buku-buku atau literatur-literatur yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan artinya data diambil dari buku-buku atau literatur-literatur yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Demokrasi Terpimpin dan Peran Politik TNI

Konstituante yang telah dibubarkan kemudian diganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Periode demokrasi terpimpin ini memang ditandai dengan ciri-ciri bahwa peran Presiden menjadi dominan. Peran DPR dan partai-partai menjadi dibatasi. Militer diberikan peran sosial-politik yang lebih luas.

Pengakhiran sistem perlembagaan adalah berakhirnya masa berlakunya UUD Sementara 1950, dan setelah itu kembali kepada UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan demokrasi terpimpin yang berdasarkan UUD 1945, maka Presiden Soekarno membentuk lembaga-lembaga kenegaraan, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Dewan Nasional yang terdiri atas wakil-wakil dari golongan fungsional, yaitu dari golongan buruh, petani, pengusaha, organisasi wanita, organisasi pemuda, pemuka agama, dan militer.

Di samping itu dibentuk wadah untuk memobilisasi semua kekuatan politik di bawah pengawasan Pemerintah. Wadah itu dibentuk pada tahun 1960, dinamakan Front Nasional, yang juga ditujukan untuk menyatukan semua kekuatan politik di dalam negeri demi melancarkan kampanye pembebasan Irian Barat. Partai-partai politik yang masih ingin terus eksis di dalam demokrasi terpimpin diharuskan menerima konsep persatuan yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis).

Semua partai politik menerima konsep Nasakom, termasuk partai-partai besar seperti

PNI, NU, dan PKI. Tapi partai Masjumi dan PSI menolak konsep Nasakom. Masjumi dan PSI kemudian dibubarkan akibat para pemimpinnya terliat dalam gerakan separatis PRRI.

Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1960 Presiden Soekarno mengemukakan bahwa revolusi Indonesia mengandung lima gagasan penting, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Pidatonya ini kemudian dinyatakan sebagai Manifesto Politik (Manipol), kemudian oleh MPRS ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Hulan Negara (GBHN) melalui Tap. I/MPRS/1960. Dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1960 GBHN ini dipertegas dalam pidatonya yang disebut Revolusi-Sosialisme-Pimpinan (Resopin), yang menekankan perlunya kepemimpinan totaliter yang dipegang oleh Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Untuk menetapkan posisinya yang sentral itu Presiden Soekarno menjadi Penguasa Perang Tertinggi (Peperiti) yang menguasai Komando Tertinggi (Koti). Semua kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin menjadi terpusat pada PBR Presiden Soekarno. Bahkan dengan alasan keadaan revolusi, maka PBR diperbolehkan untuk menyimpang dari konstitusi.

Ternyata Manipol/USDEK memiliki daya tarik bagi banyak kalangan masyarakat luas. Ada dua sebab mengenai hal ini, pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia mulai menyadari akibat buruk perpecahan pada masa-masa sebelumnya. Pernyataan Soekarno “kembali kepada kepribadian bangsa sendiri” adalah menarik bagi banyak orang. Tapi sesungguhnya orang akan menemukan sebuah penjabaran yang sangat rumit ketika berusaha mengupas makna dari Manipol/USDEK itu.

Sebagai satu contoh bahwa Manipol/USDEK itu sulit diterima oleh sebagian kalangan masyarakat adalah, di kalangan perguruan tinggi atau universitas Manipol/USDEK ini disambut dengan sikap sinis, pro dan kontra. Tapi di lain sisi di kalangan birokrasi dan partai politik yang bersimpati kepada Soekarno, maka Manipol USDEK ini adalah sebuah pandangan hidup.

Sikap otoriter Pemerintah Indonesia semakin terlihat dengan pengawasan terhadap pers di dalam negeri. Pada tahun 1960 setiap redaksi surat kabar diharuskan bersumpah setia kepada ideologi negara. Beberapa majalah dan surat kabar yang bersimpati kepada Masjumi dan PSI dicabut izin terbitnya karena menolak

ketentuan itu. Pada tahun 1961 Pemerintah melaksanakan indoktrinasi Manipol/USDEK kepada semua wartawan.

Kerjasama antar partai-partai politik yang disebut dengan Nasakom sesungguhnya hanyalah kerjasama yang semu. Partai-partai itu masih mengedepankan kepentingannya. Yang terjadi justru saling memobilisasi massa untuk menunjukkan kekuatannya. Misalnya NU dengan Gerakan Pemuda Anshor-nya dan PKI dengan Pemuda Rakjat-nya seringkali berpawai di mana maksud dari pawai-pawai itu adalah untuk saling unjuk kekuatan. Tidak terjadi bentrok antara kedua kekuatan itu bila dilihat secara keseluruhan, apalagi di Jakarta dan kota-kota besar. Tapi memang terjadi gesekan antar massa pendukung kedua partai itu di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya akibat PKI bersikap ofensif terhadap lawan-lawannya di daerah basis massanya.

2) Konflik Para Elite TNI Sepanjang Periode Demokrasi Terpimpin

a. Konflik Internal (1959-1966)

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini para pimpinan TNI, terutama Angkatan Darat dan Angkatan Laut dapat cukup bersatu dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi dalam persoalan Presiden Soekarno para pimpinan TNI tidak bisa bersatu.

Sepanjang periode tahun 1959-1962 Angkatan Darat menjadi kekuatan yang solid di bawah pimpinan Jendral AH. Nasution. Konflik internal di antara pimpinan Angkatan Darat baru di mulai ketika pada 23 Juni 1962 jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Letnan Jendral Achmad Yani. Nasution sendiri diangkat menjadi Menteri Pertahanan.

Tidak ada masalah dengan pergantian itu. Achmad Yani adalah juga seorang anti komunis yang keras seperti Nasution. Tapi dalam menghadapi Presiden Soekarno sikapnya ternyata berbeda. Achmad Yani bukanlah orang yang dengan cepat mengkritik atau melakukan koreksi atas kedekatan Soekarno dengan PKI. Dia melihat kedekatan itu hanya sebuah taktik jangka pendek untuk meningkatkan popularitas Soekarno sendiri ketimbang untuk membuat PKI lebih besar. Beda dengan Nasution yang selalu *early warning* bila melihat PKI berada di dekat Soekarno.

Konflik antara Nasution dengan Achmad Yani mulai terjadi pada tahun 1962 ketika pada tahun 1962 Achmad Yani menyetujui rencana Presiden Soekarno untuk mendudukkan Nasution hanya sebagai pejabat administrasi

saja dalam Kementerian Pertahanan. Jelas Nasution merasa “dipukul dari belakang”. Setelah Achmad Yani diangkat menjadi panglima Angkatan Darat, maka Achmad Yani segera melakukan pergantian terhadap para Panglima di daerah yang mendukung Nasution.

Di tubuh Angkatan Laut, pada tahun 1960 terjadi masalah internal. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda Subjako diprotes oleh para juniornya yang tidak setuju atas rasionalisasi pasukan yang menyebabkan tergesernya para perwira dan para prajurit yang pendidikannya kurang. Kemudian Subjako digantikan oleh Laksamana Muda Eddy Martadinata, yang kemudian dipromosikan dengan pangkat Laksamana Madya berbintang tiga.

Pada akhir tahun 1964, para perwira senior Angkatan Darat mengupayakan pertemuan antara Nasution dengan Achmad Yani. Pertemuan ini dihadiri oleh 12 Jenderal dari kedua pihak, tidak dihadiri langsung oleh Achmad Yani maupun Nasution. Pertemuan ini tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, karena pihak Achmad Yani mempertahankan kedekatan dengan Presiden Soekarno.

Pada tahun 1964 ini juga semakin terlihat perbedaan pendirian antar Angkatan di dalam TNI. Angkatan Darat jelas para pimpinannya di pusat 100% anti PKI. Tapi mendua sikap terhadap Soekarno. Tapi ada segelintir perwira di daerah yang berhasil dipengaruhi PKI. Memang ada satu perwira tinggi Angkatan Darat yang terpengaruh oleh PKI, yaitu Brigadir Jendral Superdjo yang menjabat sebagai Panglima Daerah di Kalimantan.

Angkatan Laut di bawah pimpinan Laksamana Eddy Martadinata bersikap anti PKI seperti halnya Angkatan Darat, tapi bersikap setia kepada Soekarno. Angkatan Udara ini memang tidak lepas dari sikap senior Angkatan Udara Laksamana Udara Soerjadi Soerjadharma yang tidak suka kepada para pimpinan Angkatan Darat. Ketidaksukaan para pimpinan Angkatan Udara terhadap para pimpinan Angkatan Darat adalah berpangkal dari sikap para pimpinan Angkatan Darat yang sering menganggap Angkatan Udara sebagai junior.

Mungkin juga akibat dari apa yang pernah dilakukan Angkatan Darat ketika baru saja Belanda mengakui kedulatan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949. Di zaman Soerjadi Soerjadharma oleh Jenderal Soedirman diturunkan pangkatnya dari setingkat Mayor Jenderal menjadi setingkat Kolonel. Apa yang dilakukan Jenderal Soedirman terhadap Soerjadi Soerjadharma ini adalah sebuah hukuman

disiplin terhadap Soerjadharma yang ikut menyerahkan diri kepada Belanda pada Agresi Militer Belanda II yang menawan para pimpinan Republik di Yogyakarta pada Desember 1948. Meskipun para pimpinan Angkatan Darat berhasil mendesakkan pergantian Soerjadharma kepada Oemar Dhani, tapi Oemar Dhani juga tidak suka pada para pimpinan Angkatan Darat. Bahkan Oemar Dhani menyatakan bahwa Angkatan Udara tidak akan tunduk kepada Angkatan lain, kecuali kepada Presiden Soekarno sendiri. Akhirnya para pimpinan Angkatan Udara menjadi sangat bergantung kepada Presiden Soekarno. Bahkan dalam persetujuan antara PKI dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara berada di pihak PKI.

Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) yang diumumkan di Radio Republik Indonesia (RRI) pada pagi hari 1 Oktober 1965 telah membuahkan reaksi yang berbeda-beda pada setiap Angkatan di dalam TNI.

Angkatan Darat mendasarkan bukti-bukti keterlibatan PKI dalam “G 30 S” itu pada tanggapan koran PKI “Harian Rakjat” yang memuji-muji gerakan yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Untung yang Komandan Batalyon Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden). Maka Angkatan Darat yang kepemimpinannya diambil alih Mayor Jenderal Soeharto, setelah hilangnya Letjen Achmad Yani, segera berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya terutama di Jakarta untuk melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para aktivis PKI. Lain halnya dengan Angkatan Udara yang menunggu instruksi dari Presiden Soekarno. Bahkan Angkatan Udara dituduh terlibat di dalam “G 30 S” itu karena Meyjen Soeharto menemukan senjata ringan dari jenis standar yang dimiliki oleh Angkatan Udara di Lubang Buaya, tempat penyiksaan dan pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat.

Bahwa pada 3 Oktober 1965 terjadi bentrok senjata antara pasukan dari RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) terhadap pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah. Sementara Angkatan Laut masih berada pada posisi waspada sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari keadaan yang mengejutkan itu. Tapi Angkatan Laut menunjukkan simpatinya kepada para pimpinan Angkatan Darat dengan mengerahkan pasukan Komando Intai Para Amfibi (KIPAM) untuk mengambil jenazah para perwira Angkatan Darat yang ditanam di Lubang Buaya.

Sebenarnya di dalam Angkatan Darat sendiri ada beberapa kesatuan yang terlibat dalam “G 30 S” itu. Batalyon 454 dari Diponegoro dan Batalyon 530 dari Brawijaya

adalah kesatuan yang komandannya ikut ambil bagian dalam “G 30 S” itu. Kehadiran dua Batalyon ini di Jakarta semula dimaksudkan untuk mengikuti perayaan hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober, mereka ditempatkan di Lapangan Merdeka. Brigadir Jenderal Suparjo yang menjabat sebagai Panglima Daerah di Kalimantan juga terlibat dalam “G 30 S”.

Angkatan Darat terutama dari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostard) di bawah pimpinannya yang baru Brigadir Jenderal Kemal Idris dan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo mulai melancarkan kampanye pembubaran PKI dengan memobilisasi massa dari mahasiswa. Mereka mensponsori aksi-aksi di depan Istana Negara sepanjang Januari hingga Maret 1966.

Aksi-aksi ini tentu ditanggapi dengan keras oleh pasukan Tjakrabirawa. Terjadi bentrok antar antar mahasiswa yang di-*back up* Kostard dan RPKAD terhadap Tjakrabirawa di depan Istana. Bahkan Presiden Soekarno sempat menghubungi Komandan Korps Komando Operasi (KKO) Angkatan Laut, Mayor Jenderal Hartono untuk meminta jaminan pengamanan dari rongrongan Kostard dan RPKAD. Mayjen Hartono menyanggupi memberi jaminan atas pengerahan pasukan KKO untuk menghadapi RPKAD dan Kostard.

Terlihat sekali di sini perbedaan antar Angkatan maupun kesatuan terhadap gelombang tuntutan pembubaran PKI yang mencoba mendorong Soekarno untuk bertindak tegas terhadap PKI. Angkatan Laut tidak bersimpati kepada PKI, tapi mereka tidak ingin Soekarno didorong-dorong oleh Angkatan Darat untuk menyetujui tuntutan angkatan Darat. Karena Angkatan Laut memandang hal itu dapat meruntuhkan wibawa Soekarno sebagai Presiden. Angkatan Udara jelas berpihak di mana, namun Angkatan Udara ini sejak peristiwa “G 30 S” posisinya telah dilemahkan oleh Angkatan Darat.

Pada menjelang akhir masa demokrasi terpimpin sejak 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966, para pimpinan TNI menjadi terpecah-pecah dalam berbagai pendirian mengenai bagaimana sikapnya terhadap Soekarno dan PKI. Ini merupakan masalah yang sangat rumit dan berbahaya. Bahkan di dalam Angkatan Darat sendiri sebagai pihak yang sangat jelas melancarkan kampanye tuntutan pembubaran PKI terjadi perbedaan dalam masalah operasi di lapangan. Pemerintah Soekarno untuk bertindak hati-hati justru sering diinisiasi sendiri oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhie menjadi tindakan yang lebih radikal. Pengepungan Istana pada 11 Maret 1966 itu

sesungguhnya bukan perintah Soeharto, tapi lebih pada akibat inisiatif yang dilakukan Kemal dan Edhie.

Inilah gambaran konflik internal para pimpinan TNI selama masa demokrasi terpimpin, mulai tahun 1962 yang berpangkal dari konflik antara Nasution dengan Achmad Yani, sampai pecah-belah pendirian menghadapi kondisi yang tidak menentu sepanjang 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) adalah penuntasan dari konflik internal di dalam tubuh TNI ini. Sebab dengan surat itu semuanya menjadi jelas bahwa siapa yang pada akhirnya menjadi pemegang segala kekuasaan untuk melakukan tindakan apa saja.

b. Konflik Eksternal (1959-1966)

Pada masa demokrasi terpimpin, ada tiga kutub kekuatan politik paling berpengaruh, yaitu pertama kekuasaan Presiden Soekarno, kedua TNI, ketiga PKI. Di masa-masa awal demokrasi terpimpin ini PKI mulai mencoba mendorong Presiden Soekarno untuk bentrok dengan para pimpinan Angkatan Darat yang anti komunis seperti Nasution dan Achmad Yani.

Pada bulan Juli 1960 PKI mengemukakan sebuah evaluasi yang sangat kritis terhadap Kabinet. Akibatnya para pimpinan PKI seperti D.N. Aidit, Nyoto, dan Ir. Sukiman diinterogasi dan ditahan oleh para perwira Intelijen Angkatan Darat yang dikepalai Kolonel Achmad Sukendro. Tapi kemudian atas campur tangan Presiden Soekarno, para pimpinan PKI ini dibebaskan.

Kemudian pada bulan Agustus 1960 terjadi “Peristiwa Tiga Selatan”, yaitu para Panglima Daerah Militer di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan melarang kegiatan PKI di daerahnya. Lagi-lagi Presiden Soekarno turuh tangan untuk melakukan langkah dari Angkatan Darat tersebut. Campur tangan dari Presiden Soekarno ini menimbulkan rasa kesal di kalangan perwira Angkatan Darat. Bahkan kemudian Kolonel Sukendro yang dikenal sebagai pemrakarsa utama gerakan-gerakan anti PKI ini dicopot dari jabatannya, lalu dipindah keluar negeri.

Saling menguji kekuatan antara Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat pada tahun 1960 telah memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang kekuatan masing-masing. Soekarno menyadari kebutuhannya akan dukungan dari pihak sipil, maka dia menyelamatkan PKI terhadap tekanan dari Angkatan Darat. Di lain sisi, kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa pimpinan Angkatan

Darat pada saat itu tidak akan mengambil resiko secara terbuka berkonflik dengan Soekarno mengenai niat dari pimpinan Angkatan Darat untuk membubarkan PKI.

Selama periode 1961 terjadi keseimbangan antara PKI dan TNI yang relatif stabil, karena kampanye pembebasan Irian Barat dapat meredam konflik-konflik politik di dalam negeri. Namun sesungguhnya Presiden Soekarno telah berdiri di atas sebuah keseimbangan politik yang rawan.

Pada tanggal 4 Juni 1962 TNI berhasil menangkap pemimpin pemberontakan Darul Islam (DI) Kartosuwirjo. Disusul berakhirnya kampanye pembebasan Irian Barat pada bulan Agustus 1962. Maka dengan itu tidak ada lagi alasan untuk diteruskannya pemberlakuan undang-undang darurat (SOB). Presiden Soekarno segera melakukan reorganisasi Komando Tinggi (Koti), yaitu dengan membubarkan Penguasa Perang Tertinggi (Pepertri) yang kemudian menempatkan Koti menjadi komando operasi tertinggi. Jabatan Panglima yang dijabat Nasution dihapus, tapi Achmad Yani tetap menjabat sebagai Kepala Staf. Dengan Nasution diangkat hanya sebagai Menteri Pertahanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang sifatnya administratif, dan jabatannya di Koti dihapus, maka Nasution oleh Presiden Soekarno berhasil "ditendang ke atas".

Sebenarnya untuk jabatan Panglima Angkatan Darat, Nasution mengusulkan Mayor Jenderal Gatot Soebroto untuk menggantikannya, tapi ditolak Soekarno, karena Soekarno menganggap Gatot Soebroto adalah pendukung Nasution. Nasib berpihak pada Soekarno, karena pada bulan Juni 1962 Mayjen Gatot Soebroto mendadak wafat, sehingga Soekarno dapat menunjuk Achmad Yani untuk menggantikan Nasution.

Tanggal 1 Mei 1963 Undang-Undang Darurat Perang (SOB) dicabut sebagai konsekuensi dari berakhirnya pemberontakan DI dan kampanye Irian Barat. Pencabutan undang-undang ini juga tidak lepas dari telah dituntaskannya gerakan separatis PRRI di Sumatera Tengah dan Permesta di Sulawesi Utara yang telah dihentikan oleh Achmad Yani sejak pertengahan tahun 1958. Undang-undang darurat itu memang sudah berlaku sejak bulan Maret 1957. Ini adalah usaha Presiden Soekarno untuk memperlemah TNI. Dicabutnya undang-undang darurat ini berakibat TNI kehilangan kewenangan untuk terlibat langsung dalam setiap situasi darurat. Undang-undang darurat ini sangat berguna bagi TNI. Karena TNI dapat dengan leluasa mengerahkan kekuatannya yang

berjangkauan luas untuk membendung berbagai kegiatan PKI.

Presiden Soekarno bereaksi keras terhadap pembentukan Negara Malaysia pada 16 September 1963. Pembentukan Malaysia ini dianggap sebagai penghinaan oleh Inggris kepada Indonesia. Angkatan Darat bersikap tidak bersemangat menanggapi konfrontasi ini, karena akibat dari konfrontasi yang dilancarkan oleh Soekarno ini, program perbaikan ekonomi yang akan mendapatkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF) menjadi kabur seketika. PKI menganggap para perwira Angkatan Darat yang bersikap dingin terhadap konfrontasi ini sebagai "kapitalis-birokrat" dan sebagai "kaki-tangan" dari Barat.

Angkatan Darat telah menganggap bahwa Front Nasional yang dibentuk sejak bulan Maret 1961 untuk kampanye perjuangan pembebasan Irian Barat, yang terdiri dari partai-partai politik dan TNI, serta dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri, telah didominasi oleh PKI.

Maka atas dasar pertimbangan untuk mengimbangi dominasi PKI atas Front Nasional, para pimpinan Angkatan Darat membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini terdiri atas organisasi-organisasi masa yang dibentuk TNI untuk mengimbangi organisasi-organisasi massa dari PKI. Misalnya SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) dibentuk untuk meredam segala kegiatan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi massa buruh dari PKI. Lalu dibentuknya Persi (Persatuan Istri Tentara) yang dipimpin Nyonya Achmad Yani, dimaksudkan untuk meredam kegiatan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang merupakan ormas wanita dari PKI selain itu dibentuk organisasi Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR), Koperasi Serba Guna Gotong-Royong (Kosgoro), dan Gerakan Karyawan Indonesia (Gakari), semuanya adalah bertujuan untuk meredam kegiatan-kegiatan PKI dengan ormas-ormasnya.

Memang sesungguhnya konflik yang frontal antara TNI dengan PKI telah dimulai sejak peristiwa Madiun 1948, ketika TNI melakukan penumpasan terhadap pemberontakan PKI. Kemudian PKI menyadari bahwa pengaruhnya di dalam tubuh Angkatan Bersenjata masih sangat lemah. Di mana para pimpinan PKI sadar bahwa sewaktu-waktu Angkatan Darat dapat bertindak keras terhadapnya dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Angkatan Darat, dan PKI yang

tidak bersenjata tentu tidak akan mampu melawannya.

Bersamaan dengan itu PKI dengan dibantu para perwira yang telah dibinanya, seperti Brigadir Jenderal Supardjo, Mayor Jenderal Pranoto, Kolonel Latif, dan Letnan Kolonel Untung, melontarkan isu bahwa ada “Dewan Jenderal” yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Achmad Yani dan stafnya untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Achmad Yani mengetahui rencana PKI memperkuat dirinya dengan cara meminta persenjataan untuk kaum Buruh-Tani. Achmad Yani menolak langkah itu dan bersikap frontal menentang PKI. Dalam upaya mengatasi “Dewan Jenderal”, maka Letkol Untung sebagai Komandan Batalyon I Tjakrabirawa (pasukan pengawal Presiden) melakukan sebuah gerakan yang dinamakan “Gerakan 30 September” (G 30 S). Gerakan ini menangkapi dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Achmad Yani, dan seorang Letnan Satu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution. Tapi Nasution sendiri lolos dari penculikan itu.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi jam 7.00, Letkol Untung mengangkat dirinya sebagai ketua “Dewan Revolusi” dengan wakilnya Brigjen Supardjo. Semua pangkat diturunkan di bawah Letkol, dan para bintang dan tamtama pangkatnya dinaikkan satu tingkat, untuk memperoleh dukungan massal.

Kemudian Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostard), dengan ini Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalyon 328 Kostard melakukan pembersihan terhadap “G 30 S”.

Akibat kekalahan “G 30 S” itu maka PKI mundur ke Gunung Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah, dan ke Blitar Selatan, Jawa Timur. Pasukan RPKAD berhasil menumpas PKI di kedua daerah itu.

Sepanjang tanggal 2 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966 terjadi konflik antara pimpinan Angkatan Darat yang telah diambil alih oleh Mayjen Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Konflik ini berawal dari keputusan Soekarno ingin mengangkat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai Panglima Angkatan Darat yang baru. Walaupun Soeharto mempersilahkan keputusan Soekarno, tapi Soeharto menyatakan kepada Soekarno, bahwa dia tidak bertanggungjawab lagi atas keamanan di Ibukota. Akhirnya dua minggu kemudian Presiden Soekarno mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat yang baru untuk menggantikan Achmad Yani yang telah meninggal. Kemudian berdasarkan

Surat Perintah Sebelas Maret 1966, maka Soeharto segera membubarkan PKI.

c. Dampak Konflik Politik

Para elite TNI ternyata tidak pernah bersatu sikap sepanjang masa demokrasi terpimpin. Konflik internal yang terjadi pada para elite TNI ternyata juga berdampak pada konflik eksternalnya, juga sebaliknya.

Perbedaan pendirian antara para pimpinan Angkatan telah mengakibatkan tidak solidnya TNI menghadapi PKI. Jelas terindikasi dengan para pimpinan Angkatan Darat yang berkonflik terbuka terhadap PKI, sementara di lain sisi justru Angkatan Udara berpihak kepada PKI dengan kesediaan Laksamana Madya Oemar Dhani mengangkut senjata dari China untuk PKI.

Kemudian meskipun para pimpinan Angkatan Darat solid dalam konflik terhadap PKI, tapi tidak solid dalam menghadapi Presiden Soekarno. Jenderal Nasution berkonflik dengan Letnan Jenderal Achmad Yani akibat persetujuan Achmad Yani atas keputusan Presiden Soekarno yang akan mendudukkan Nasution hanya sebagai Menteri Pertahanan yang bersifat administratif, yang tidak memiliki kewenangan atas pergerakan pasukan.

Akibat konflik-konflik seperti yang telah dijelaskan di atas, maka jelas bahwa sesungguhnya para pimpinan TNI selalu disibukkan dengan konflik-konflik internal maupun eksternal. Para pimpinan TNI selama masa demokrasi terpimpin itu tidak pernah dapat menyatukan sikapnya. Meskipun para TNI sebagai kekuatan politik telah membuktikan bahwa kekuatannya sangat berarti dalam politik. Indikasinya dapat dilihat dari anggota Kabinet Kerja yang sepertiganya adalah perwira militer, dan 35 dari 283 anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) juga dari perwira militer. Kemudian juga dengan doktrin perang wilayahnya yang membuatnya menjadi seperti birokrasi dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

Menurut Kivlan Zen (2004), “konflik keluar tidak selalu dapat meredakan konflik di dalam”. Itu berlaku kepada yang terjadi di Indonesia, terutama juga kepada para elite TNI. Konflik eksternalnya tidak membuatnya menjadi kekuatan yang solid pada kondisi internalnya. Dengan demikian jelas bahwa para pimpinan TNI memang tidak dapat bersatu sikap selama masa demokrasi terpimpin.

Para elite TNI, apakah itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, ataupun Angkatan Udara, tidak pernah dapat bersatu sikap selama masa

demokrasi dipimpin. Masing-masing dari mereka tentu punya tujuan dengan sikapnya. Jadi dengan sikap para elite TNI yang terpecah-pecah itu membuat Presiden Soekarno menjadi lebih mudah untuk tetap memegang kendali terhadap elite TNI.

Konflik para elite TNI terhadap pimpinan PKI juga membuat tiga kutub kekuatan, yaitu Soekarno, TNI dan PKI menjadi cenderung stabil sehingga Soekarno dapat mempertahankan kekuasaannya di atas “dua kakinya”, yaitu TNI dan PKI. Walaupun sesungguhnya “kedua kaki” itu adalah keseimbangan yang rawan.

KESIMPULAN

Sepanjang periode demokrasi dipimpin didalam tubuh TNI telah diketahui bahwa terjadi beberapa konflik internal di antara para perwira seniornya. Sebagai satu contoh yaitu konflik yang terjadi antara Jenderal Nasution dengan Letnan Jenderal Achmad Yani pada tahun 1962, ketika kedudukan Jenderal Nasution sebagai Panglima Angkatan Darat diganti oleh Letjen Achmad Yani.

Selain itu, perbedaan sikap antar Angkatan di dalam TNI, di mana Angkatan Darat bersikap keras terhadap PKI, sementara Angkatan Laut juga mengikuti sikap Angkatan Darat dalam menghadapi PKI. Tapi lain halnya Angkatan Udara yang justru berseberangan dengan Angkatan Darat karena para perwira senior Angkatan Udara tidak suka kepada para perwira senior Angkatan Darat, karena merasa dianggap junior oleh Angkatan Darat. Dan mungkin juga akibat senior Angkatan Udara, Laksamana Soerjadi Soerjadharma pada tahun 1949 pernah dihukum penurunan pangkat oleh Jendral Soedirman.

Ketika terjadi “Gerakan 30 September 1965” (G 30 S), angkatan-angkatan di dalam TNI terpecah-belah dalam menyikapinya. Perpecahan ini tercermin dari kejadian-kejadian, contohnya kontak senjata antara Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dengan Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah, Jakarta. Kemudian keterlibatan Batalyon 454 Kodam Diponegoro dan Batalyon 530 Kodam Brawijaya juga merupakan cermin dari perpecahan sikap terhadap “G 30 S”. Bahkan “G 30 S” itu dilakoni oleh sebagian pasukan Tjakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden. Ketika pasukan Komando Stategis Angkatan Darat (Kostard) dan RPKAD berada di pihak mahasiswa yang menyuarakan Trituna dengan melakukan aksi-aksi di depan Istana Negara, maka Komandan Korps Komando Operasi

Angkatan Laut (KKO), Mayor Jenderal Hartono bersedia memberikan jaminan kepada Presiden Soekarno menghadapi RPKAD.

Semua peristiwa di atas adalah gambaran dari konflik internal di dalam tubuh TNI pada masa demokrasi dipimpin. Konflik internal itu terjadi antar individu, karena jelas perselisihan itu terjadinya adalah di antara para perwira militer yang terlihat sebagai sebuah persaingan. Bila mengacu kepada apa yang lontarkan oleh Maurice Duverger, maka persaingan yang terjadi di antara perwira-perwira TNI itu adalah konflik politik antar individu. Persaingan antar perwira itu terjadi tidak lebih hanyalah untuk meraih simpati dan memperoleh pengaruh yang sebesar-besarnya di dalam kekuasaan demokrasi dipimpin itu. Maksudnya adalah dari masing-masing dari individu itu berusaha menunjukkan kepada penguasa rezim demokrasi dipimpin, yaitu Presiden Soekarno, bahwa siapa di antara mereka yang paling patuh dan paling pantas mendapatkan kedudukan di dalam rezim itu.

Persaingan para perwira itu bukan untuk melakukan perebutan atau penguasaan penuh atas rezim. Tapi hanya untuk mencari kedudukan yang sebaik-baiknya dan dapat berpengaruh besar di dalam rezim itu. Maka menurut Maurice Duverger, konflik seperti ini adalah konflik politik antar individu di seputar rezim, bukan konflik antar individu untuk merebut rezim.

Masalah ketegangan politik antar para perwira militer setelah peristiwa “G 30 S” itu juga merupakan persaingan yang merupakan kecenderungan dari satu pihak individu, untuk mendapatkan dominasi atas kewenangan memerintah dari satu individu terhadap individu lain. Menurut Maurice Duverger, ketegangan dalam kalangan para perwira militer ketika terjadi kampanye-kampanye yang dilancarkan oleh Angkatan Darat untuk membubarkan PKI, adalah sebuah persaingan di mana terjadi saling menunjukkan bakat antar individu itu untuk memperlihatkan bahwa ada satu pihak yang lebih berbakat dan lebih mampu untuk menjamin kekuasaan.

Di dalam konflik politik yang bersifat individu, sebagaimana di dalam persaingan ekonomi, maka peserta yang terbaik akan menang. Yaitu pihak yang paling bermutu dalam kecerdasannya, keberaniannya, kekuatannya, kelicikannya, dan kemampuannya bekerja. Ini berlaku dalam teori liberal mengenai kompetisi ekonomi dan kompetisi politik. Namun selama masa berlangsungnya demokrasi dipimpin, tidak ada satupun pihak yang keluar sebagai pemenang. Tidak satupun dari para perwira militer itu, baik Achmad Yani,

Nasution, maupun para perwira Angkatan Udara, atau perwira-perwira lainnya yang keluar sebagai pemenang dalam konflik antar individu di dalam rezim itu. Mungkin ini akibat bahwa konflik di antara para perwira itu memang sengaja dikelola oleh penguasa, yaitu Presiden Soekarno, untuk mempertahankan kekuasaannya melalui pengelolaan konflik itu. Ini berarti penguasa melakukan pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di seputar kekuasaannya.

Lain halnya dengan teori konservatif, bahwa yang paling mampu bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling licik. Tapi yang akan keluar sebagai pemenang adalah pihak yang paling baik. Pengertian baik di sini adalah berdasarkan ukuran moral. Perjuangan politik memang memiliki dua motivasi, yaitu apabila kekuasaan atau pengaruh telah teraih, maka motivasinya adalah kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi, atau untuk dedikasi pada pelayanan umum.

Konflik eksternal TNI selama masa demokrasi terpimpin adalah konflik yang sangat tajam antara Angkatan Darat terhadap PKI. Ada kalanya terjadi adu kekuatan antara Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno dalam masalah PKI, yaitu seperti yang telah tertulis di Bab III mengenai Soekarno yang selalu campur tangan untuk menghindarkan PKI dari setiap tekanan yang datang dari Angkatan Darat.

Persaingan yang tajam antara Angkatan Darat dengan PKI juga sebagai upaya dari masing-masing pihak untuk membela kepentingan kelompoknya atau golongannya. Maurice Duverger juga mengatakan, bahwa pergolakan di dalam rezim adalah demi kepentingan masing-masing kelompoknya atau kelasnya. PKI memang dalam gerakan politik adalah dengan menjamin kekuasaan dan melaksanakannya demi kepentingan politiknya. Begitu pula dengan Angkatan Darat yang dalam peran politiknya juga menjamin kekuasaan yang tujuannya adalah untuk kepentingan korpsnya.

Pergolakan politik di dalam rezim tanpa harus merebut rezim bisa terjadi apabila di dalam negeri mayoritas mutlak warganya masih menganggap rezim yang memerintah sebagai rezim yang sah.

Konflik melawan rezim tidak selalu dapat diartikan sebagai perjuangan merebut rezim, tapi bisa juga menjadi bagian dari pergolakan di dalam rezim. Konflik antara perwira Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno mengenai masalah PKI, mungkin termasuk dalam konflik melawan rezim. Tapi tidak ada upaya dari Angkatan Darat untuk menggulingkan rezim kekuasaan dari Presiden Soekarno. Menjadi

lawan dari rezim adalah bukan berarti menjadi musuh dari rezim.

Namun dengan Presiden Soekarno membiarkan Angkatan Darat menjadi lawan dari rezim berarti demokrasi terpimpin adalah sebuah rezim demokrasi. Bila Angkatan Darat dibiarkan menjadi "oposisi" terhadap Soekarno, maka itu karena kebutuhan Soekarno terhadap keberadaan Angkatan Darat. Namun bila yang menjadi oposisi adalah partai politik sipil, maka Soekarno akan segera membubarkannya. Sebagai contoh adalah Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) beroposisi terhadap rezim demokrasi terpimpin, maka kedua partai politik itu dibubarkan pada tahun 1960 oleh Soekarno. Hanya rezim demokrasi yang mensahkan adanya oposisi di dalam kekuasaannya. Konflik politik adalah berarti ketegangan politik antar dua pihak yang berkepentingan pada kekuasaan politik. Konflik politik bisa terjadi antara individu ataupun kolektif.

Dengan konflik-konflik yang dialami oleh para pimpinan TNI pada internal dan eksternalnya jelas telah membuat para pimpinan TNI itu tidak dapat menyatukan sikapnya. Sehingga dengan terpecah-pecahnya sikap dari para pimpinan TNI itu, maka Presiden Soekarno tetap dapat mengendalikan para pimpinan TNI. Dengan demikian telah jelas konflik seperti apa yang dialami oleh para pimpinan TNI pada konflik internal dan eksternalnya berdasarkan kerangka teori konflik yang dilontarkan oleh Maurice Duverger.

DAFTAR PUSTAKA

- Bijkerk, J.C. (1988). *Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Britton, Peter. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (1996). *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Duverger, Maurice. (2003). *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Feith, Herbert. (1995). *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hanafi, A.M. (1998). *Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto*, Lille-France: Edition Montblanc.

- Idris, Kemal. (1996). *Bertarung dalam Revolusi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Malo, Manasse. (1986). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Nasution, Abdul Haris. (1986). *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Perlmutter, Amos. (1984). *Militer dan Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singh, Bilveer. (1995). *Dwifungsi ABRI*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- _____, (1997). *Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Van Dijk, Cornelis. (1983). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Zen, Kivlan. (2004). *Konflik dan Integrasi TNI-AD*, Jakarta: Institute for Policy Studies.